

### REPLANTING Mendukung Upaya Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit

Oleh  
Tim Riset PASPI

#### ABSTRAK

*Perkembangan kelapa sawit di Indonesia mulai memasuki pengembangan industri tahap kedua yaitu peningkatan produktivitas kelapa sawit. Peningkatan produktivitas ini akan semakin memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia yang sering dianggap sebagai faktor penyebab deforestasi dan hilangnya biodiversitas. Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat dapat dilakukan dengan perbaikan kultur teknis (best management practices) atau penggunaan bibit unggul saat proses replanting. Program intensifikasi pertanian kelapa sawit berupa perbaikan kultur teknis dan replanting dengan menggunakan bibit unggul ini akan memberikan dampak kenaikan produktivitas sawit nasional menjadi 4.4 ton/hektar tahun 2020 dan 7.42 ton/hektar tahun 2050. Pola kemitraan yang dulu telah terbukti mendorong perkembangan sawit nasional, dapat dimanfaatkan kembali untuk mensukseskan program replanting sawit rakyat. Dengan adanya kemitraan, perusahaan inti dapat membantu teknis budidaya dan mengawasi proses replanting sawit rakyat dengan model peremajaan underplanting yang dianggap lebih sesuai untuk kondisi sosial ekonomi petani sawit rakyat.*

**Keywords :** kemitraan, peningkatan produktivitas, replanting, sawit rakyat

## PENDAHULUAN

Kelapa sawit sebagai komoditas yang telah mengubah peta minyak nabati dunia semakin menarik perhatian berbagai pihak yang berkepentingan, baik pihak yang mendukung maupun yang menolak pengembangan sawit. Pada tahun 1980, minyak kedelai masih mendominasi pasar minyak nabati dunia dengan pangsa 53%, namun pada tahun 2016 pangsa minyak kedelai hanya tersisa 33%, sementara minyak kelapa sawit memegang 39.4% pangsa minyak nabati dunia pada tahun yang sama (USDA 2017). Perubahan yang cukup signifikan ini menyebabkan produsen minyak nabati jenis lain merasa terancam sehingga berbagai isu digunakan untuk menekan perkembangan agribisnis kelapa sawit.

Perkembangan kelapa sawit di Indonesia mulai memasuki pengembangan industri tahap kedua yaitu peningkatan produktivitas kelapa sawit. Peningkatan produktivitas ini akan semakin memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia yang sering dianggap sebagai faktor penyebab deforestasi dan hilangnya biodiversitas. Pada tahun 2017, produktivitas perkebunan rakyat hanya 2.38 ton per hektar, sementara perkebunan Negara dan perkebunan swasta masing – masing memiliki produktivitas 3.32 ton per hektar dan 3.17 ton per hektar. Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah sementara luas area perkebunan rakyat di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 4 756 272 hektar atau sekitar 38.6% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia (Ditjenbun 2017). Berdasarkan data tersebut, perkebunan rakyat harus menjadi fokus utama program peningkatan produktivitas kelapa sawit Indonesia.

Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat dapat dilakukan dengan perbaikan kultur teknis (*best management practices*) atau penggunaan bibit unggul saat proses *replanting*. Namun proses *replanting* kelapa sawit di perkebunan rakyat sering terkendala modal untuk membeli bibit. Selain itu dibutuhkan perencanaan yang tepat terkait pola *replanting* agar petani sawit tetap memiliki penghasilan selama

selama periode tanaman belum menghasilkan proses *replanting* tersebut. Tulisan ini mendiskusikan pentingnya program *replanting* untuk pengembangan industri kelapa sawit, dan bagaimana pola *replanting* yang tepat diterapkan oleh perkebunan sawit rakyat.

## REPLANTING DALAM UPAYA MENDUKUNG KEBERLANJUTAN KELAPA SAWIT

Isu keberlanjutan (*sustainability*) merupakan fokus baru dalam industri kelapa sawit dunia sejak munculnya anggapan bahwa kelapa sawit adalah faktor penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan lainnya. Meskipun anggapan tersebut sudah ditepis lewat berbagai jurnal ilmiah, namun produsen – produsen minyak kelapa sawit tetap dituntut untuk membuktikan bahwa produksi kelapa sawitnya tersebut berkelanjutan. Pembuktian ini dilakukan dengan sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) terutama untuk pasar Eropa dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Momentum *replanting* sebagai proses penggantian tanaman yang tidak produktif lagi dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Dengan adanya *replanting* maka perkebunan yang pada awalnya tidak menggunakan bibit unggul, dapat diganti dengan bibit-bibit unggul sehingga pada akhirnya dengan luasan lahan yang sama akan dapat menghasilkan produksi minyak kelapa sawit lebih banyak. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah menghasilkan berbagai varietas bibit unggul yang siap dimanfaatkan dalam proses *replanting* di perkebunan-perkebunan kelapa sawit dengan potensi CPO antara 7.5 hingga 9.6 ton per hektar (Tabel 1). Melalui pemanfaatan bibit-bibit unggul tersebut diharapkan produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia dapat meningkat memenuhi target pencapaian produktivitas TBS sebesar 35 ton per hektar per tahun dan rendemen CPO 26 %.

Tabel 1. Potensi CPO Varietas Bibit Unggul Kelapa Sawit

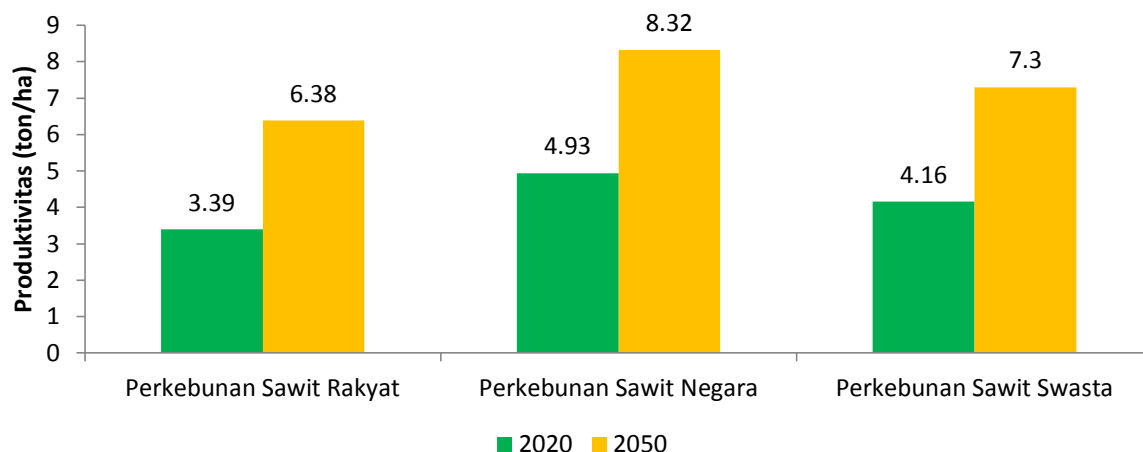
No	Grup	Varietas	Potensi TBS (ton/ha/tahun)	Rendemen (%)	Potensi CPO (ton/ha/tahun)
1	Dumpy	Dy x P SP-1 (Dumpy)	32	26	7,5
2	SP540	D x P AVROS	30	26	7,8
		D x P Simalungun	33	26,5	8,7
		D x P PPKS 540	33	29,9	9,6
3	Yangambi	D x P Yangambi	39	26	7,5
		D x P PPKS 718	28	25,17	8,11
		D x P PPKS 239	38	25,8	8,4
4	Langkat	D x P Langkat	31	26,3	8,3

Sumber : PPKS

Penggunaan bibit unggul dalam proses *replanting* kebun kelapa sawit akan sejalan dengan upaya pembuktian keberlanjutan (*sustainability*) kelapa sawit Indonesia. Meskipun tidak relevan lagi mempertanyakan perkebunan kelapa sawit apakah *unsustainable* atau telah *sustainable*, melainkan masalah *degree of sustainability*. Hal ini berimplikasi pada prinsip dan indikator pengurangan *sustainability* pada lembaga CSPO seperti ISPO dan RSPO. Prinsip dan indikator yang relevan digunakan untuk mengukur *sustainability* perkebunan kelapa sawit adalah variabel-variabel *degree of sustainability* dengan memberi bobot yang besar pada prinsip dan indikator yang bersifat *pareto improvement* (PASPI 2015).

Penggunaan bibit unggul dalam perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO dan ISPO. Pada prinsip dan kriteria RSPO, penggunaan bibit unggul ini tercantum pada prinsip keempat yaitu penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang salah satu indikatornya adalah perkebunan menggunakan bibit unggul dalam proses produksinya. Sementara hal tersebut termasuk dalam prinsip kedua ISPO yaitu penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit.

Berdasarkan perhitungan PASPI (2014), Program intensifikasi pertanian kelapa sawit berupa perbaikan kultur teknis dan *replanting* dengan menggunakan bibit unggul ini akan memberikan dampak kenaikan produktivitas sawit nasional menjadi 4.4 ton/hektar tahun 2020 dan 7.42 ton/hektar tahun 2050. Produktivitas sawit rakyat akan meningkat menjadi 3.39 ton/hektar (2020) dan 6.38 ton/hektar (2050). Sementara produktivitas sawit negara menjadi 4.93 ton/hektar (2020) dan 8.32 ton/hektar (2050). Sedangkan produktivitas sawit swasta menjadi 4.16 ton/hektar (2020) dan 7.3 ton/hektar (2050) (Gambar 1). Peningkatan produktivitas ini tentu diharapkan mampu memenuhi permintaan minyak kelapa sawit seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang cukup pesat dan diperkirakan mencapai 9.8 milyar orang pada tahun 2050. Peningkatan produktivitas ini juga semakin membuktikan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia dapat ditingkatkan tanpa melakukan perluasan wilayah yang dianggap menyebabkan deforestasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *replanting* adalah salah satu momentum dalam upaya pencapaian keberlanjutan (*sustainability*) kelapa sawit Indonesia.



Gambar 1. Proyeksi Produktivitas Perkebunan Sawit Rakyat, Negara dan Swasta tahun 2020 dan 2050

### MEKANISME *REPLANTING* PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT

Kelapa sawit yang telah menjadi komoditas strategis Indonesia mulai memasuki tahap peremajaan tanaman. Momentum peremajaan sangat penting dalam upaya mempertahankan posisi strategis kelapa sawit Indonesia dan upaya memenuhi aspek keberlanjutan (*sustainability*) sehingga membutuhkan perhatian pemerintah. Upaya peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat didukung pemerintah dengan adanya bantuan dana sebesar Rp 25 juta per hektar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal ini dilakukan karena salah satu masalah yang dihadapi petani sawit rakyat adalah modal atau akses untuk mendapatkan kredit.

Pada tahun 2017, terdapat sekitar 2,4 juta hektar perkebunan sawit rakyat yang perlu peremajaan. Lokasi target peremajaan perkebunan sawit rakyat tersebut tersebar di 20 Provinsi dan 75 Kabupaten, dan membutuhkan benih untuk peremajaan sekitar 27 juta batang sawit. Target peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat pada tahun 2017 sekitar 20.780 hektar dengan inisiasi peremajaan dilakukan di Musi Banyuasin dan Serdang Bedagai. Sementara pada tahun 2018 ini, target peremajaan ditingkatkan hingga mencapai 185.000 hektar perkebunan sawit rakyat (Ditjenbun 2018).

Mekanisme *replanting* pada perkebunan sawit rakyat tersebut harus tepat manajemen karena proporsi perkebunan sawit rakyat semakin besar dalam industri kelapa sawit Indonesia. Perkebunan sawit rakyat pada tahun 2017 telah mencapai 38.6% dari total area kelapa sawit Indonesia dengan proporsi produksi 32% dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia (Ditjenbun 2017). Kesalahan pengelolaan *replanting* kelapa sawit rakyat justru dapat menyebabkan penurunan pada perekonomian Indonesia karena perkebunan kelapa sawit Indonesia yang telah menciptakan manfaat yang besar dalam output, pendapatan, nilai tambah, dan penciptaan kesempatan kerja dalam perekonomian secara keseluruhan. Manfaat ekonomi yang tercipta di sentra perkebunan kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kebun sawit tetapi juga dinikmati oleh mereka yang menjadikan masyarakat masyarakat kebun sawit sebagai pasar produknya. World Bank (2012) menyebut hal ini sebagai pembangunan/pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) yang dalam konteks ini perkebunan kelapa sawit yang inklusif.

Dukungan pemerintah berupa modal untuk *replanting*, juga harus disertai dengan mekanisme manajemen *replanting* yang dapat mengakomodir praktek *replanting* sawit rakyat. Pemerintah tidak mungkin mengontrol *replanting* yang dilakukan petani-petani sawit rakyat secara satu persatu pada lahannya masing-masing

sehingga dibutuhkan mekanisme yang lebih efisien dalam mensukseskan program *replanting* yang dicanangkan pemerintah. Kemitraan merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan kembali dalam upaya *replanting* sawit rakyat. Hal ini sesuai dengan Permentan No. 18 Tahun 2016 yang menyatakan peremajaan perkebunan sawit dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan saling menguntungkan.

Seperti telah kita ketahui bersama, perkebunan kelapa sawit rakyat berkembang dengan diberlakukannya beberapa pola-pola kemitraan yaitu pola kemitraan PIR (PIR Khusus dan PIR Lokal), Pola PIR Transmigrasi, Pola PIR KKPA, dan Pola PIR Revitalisasi Perkebunan. Keberhasilan program kemitraan tersebut mendorong perkembangan sawit rakyat menyebabkan terjadi revolusi dalam industri minyak sawit Indonesia yang oleh Byerlee *et al.* (2017) disebut sebagai revolusi minyak nabati tropis. Pola kemitraan ini dipandang sebagai *big-push strategy* pembangunan perkebunan kelapa sawit. *Big-push strategy* ini secara konseptual pernah dikemukakan oleh Rostenstain-Rodan (1943) yang mengatakan bahwa untuk menghasilkan kemajuan pembangunan yang cepat dan besar diperlukan dorongan investasi yang massif, terkonsentrasi, fokus (*big-push*) dan tidak bisa dihasilkan hanya dengan investasi kecil-kecilan secara sporadis (*bit by bit*).

Berdasarkan skema peremajaan perkebunan sawit rakyat yang dibentuk BPDPKS, program *replanting* dilakukan melalui koperasi-koperasi sawit rakyat yang telah memenuhi persyaratan bantuan dana, dan dalam prakteknya dilakukan pendampingan dan pengawasan dari pihak Dinas Pertanian, BPDPKS, Perusahaan Inti, dan lainnya. Perusahaan inti dalam kemitraan memegang peranan penting dalam mensukseskan program *replanting* sawit rakyat. Perusahaan inti diharapkan memberikan pelatihan bagi petani terkait teknik budidaya, pemilihan bibit, dan bahkan dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk menjelaskan prinsip keberlanjutan sesuai kriteria ISPO maupun RSPO.

Beberapa model peremajaan dapat digunakan petani mitra, seperti peremajaan konvensional, model *underplanting*, dan model *intercropping*. Peremajaan secara konvensional dimana mengganti tanaman tua secara bersamaan dianggap menguntungkan perusahaan inti karena akan memudahkan dalam pengelolaan dan pengawasan karena umur tanaman relatif sama sehingga dapat mengefisienkan biaya produksi dan mengoptimalkan penggunaan alat-alat produksi. Namun model *underplanting* lebih sesuai diterapkan oleh petani mitra secara finansial karena petani masih memiliki penghasilan selama masa peremajaan berlangsung (Susanti *et al.* 2014). Dan berdasarkan penelitian Syakir *et al.* 2015, model *underplanting* pola 20-20-60 yaitu 20% peremajaan tanaman tua dilakukan pada tahun pertama, 20% pada tahun kedua, dan 60% pada tahun ketiga, dianggap sebagai pola yang paling efisien dan menguntungkan.

## KESIMPULAN

Momentum *replanting* sebagai proses penggantian tanaman yang tidak produktif lagi dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Dengan adanya *replanting* maka perkebunan yang pada awalnya tidak menggunakan bibit unggul, dapat diganti dengan bibit-bibit unggul sehingga pada akhirnya dengan luasan lahan yang sama akan dapat menghasilkan produksi minyak kelapa sawit lebih banyak. Program intensifikasi pertanian kelapa sawit berupa perbaikan kultur teknis dan *replanting* dengan menggunakan bibit unggul ini akan memberikan dampak kenaikan produktivitas sawit nasional menjadi 4.4 ton/hektar tahun 2020 dan 7.42 ton/hektar tahun 2050. Momentum *replanting* ini juga dapat membantu memperbaiki citra perkebunan kelapa sawit Indonesia di kancah internasional sehingga ke depan tidak terjadi lagi embargo kelapa sawit karena sudah memenuhi standar keberlanjutan sesuai kriteria RSPO dan ISPO.

Mekanisme peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat dilakukan dengan bantuan dana dari BPDPKS, dan adanya

pendampingan dan pengawasan dari beberapa pihak. Pola kemitraan yang dulu telah terbukti mendorong perkembangan sawit nasional, dapat dimanfaatkan kembali untuk mensukseskan program *replanting* sawit rakyat. Dengan adanya kemitraan, perusahaan inti dapat membantu teknis budidaya dan mengawasi proses *replanting* sawit rakyat dengan model peremajaan *underplanting* yang dianggap lebih sesuai untuk kondisi sosial ekonomi petani sawit rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Byerlee *et al.* 2017. *The Tropical Crop Revolution*. Stanford University.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2017. Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 :Kelapa Sawit. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2018. Percepatan Sertifikasi ISPO. 2<sup>nd</sup> International Conference and Expo on Indonesian Sustainable Palm Oil. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- PASPI. 2014. *The Sustainability of Indonesian Palm Oil Industry: Its role in: Economic Growth, Rural Development, Poverty Reduction, and Environmental Sustainability*. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Bogor.
- PASPI. 2015. Multifungsi Perkebunan Kelapa Sawit dan Isu Sustainability. *Monitor, Analisis Isu Strategis Sawit*. 1 (1): 1-10.
- Rostenstain-Rodan, P. N., 1943. "Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe", *The Economic Journal*, Vol. 53, No. 210/211, pp 202-211
- Susanti E, Hutabarat S, Muwardi D. 2014. Analisis Perbandingan Alternatif Model Peremajaan Kelapa Sawit Konvensional dengan Underplanting Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di Desa Sei Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Jom Faperta*. 1(2).
- Syakir M, Herman M, Pranowo D, Ferry Y. 2015. Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Serta Pendapatan Petani pada Model Peremajaan Sawit Secara Bertahap. *Jurnal Littri*. 21(2): 69-76.
- World Bank, 2012. *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*. World Bank. Washington DC